

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan temuan-temuan hasil penelitian, implikasi temuan, saran-saran dan rekomendasi kepada pihak yang terkait di bidang pengembangan kurikulum dan pendidikan dasar.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi, analisis, dan pembahasan data hasil penelitian mengenai kesesuaian antara implementasi kurikulum IPS dengan dokumen kurikulum dan pandangan pengembang kurikulum tentang konsep IPS dan kurikulum IPS, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Mengenai konsep IPS

Terdapat perbedaan pendapat di antara pengembang kurikulum tentang konsep IPS yakni mengenai arti dan tujuan diberikannya pendidikan IPS. Perbedaan pandangan ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni persepsi pengembang kurikulum yang mengatakan bahwa IPS merupakan suatu bidang kajian yang membahas mengenai hubungan antar manusia / kelompok dan telaah masalah-masalah yang

muncul dalam masyarakat, dan persepsi pengembang kurikulum yang berpendapat bahwa IPS merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang berhubungan dengan lingkungan sejalan dengan perkembangan IPTEK dan komunikasi. Pandangan dari kelompok pertama mengacu kepada kelompok pendidikan sosial (*social education*), di mana konsekuensi dari penganut pandangan ini adalah pengembangan kurikulumnya tidak berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial melainkan dari problema yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan dari kelompok kedua mengacu kepada kelompok pendidikan ilmu-ilmu sosial, di mana menurut pandangan kelompok ini, pengembangan kurikulum berasal dari penetapan disiplin ilmu-ilmu sosial yang kemudian dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Perbedaan pendapat ini mengakibatkan ketidakjelasan konsep IPS yang tertuang dalam dokumen kurikulum, apakah IPS yang diberikan pada jenjang sekolah dasar merupakan pendidikan sosial ataukah pendidikan ilmu-ilmu sosial. Dokumen kurikulum IPS memuat pernyataan yang mewakili kedua pandangan tersebut yakni pernyataan bahwa IPS berfungsi sebagai ilmu pengetahuan dan pernyataan bahwa IPS mempelajari berbagai kenyataan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dimuatnya dua pandangan yang berbeda secara prinsip mengenai konsepsi IPS ini dalam dokumen kurikulum menyebabkan ketidakjelasan arah pengembangan kurikulum IPS selanjutnya, apakah materi kurikulum IPS akan dikembangkan berdasarkan kajian masalah-masalah sosial dalam masyarakat ataukah berdasarkan penetapan disiplin ilmu-ilmu sosial.

2. Kesesuaian antara implementasi kurikulum IPS dalam tahap perencanaan pengajaran dengan dokumen dan pandangan pengembang kurikulum.

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan pengajaran terdapat kesesuaian antara implementasi dengan tuntutan kurikulum. Kesesuaian tersebut meliputi :

- a) Pengembangan program catur wulan dan rencana harian telah dilaksanakan guru sesuai dengan tuntutan kurikulum. Temuan hasil penelitian memperlihatkan bahwa guru mengembangkan program catur wulan sebelum kegiatan tahun ajaran baru berlangsung, dan setiap hari guru membuat rencana harian yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari itu.
- b) Perencanaan yang dikembangkan oleh guru didasarkan kepada GBPP dan disesuaikan dengan buku paket IPS.
- c) Materi pembelajaran dikembangkan dari GBPP, buku paket, dan diperluas dengan buku pelengkap.
- d) Metode pembelajaran dikembangkan sesuai dengan yang disarankan oleh dokumen kurikulum, yakni diselaraskan dengan kemampuan guru, kemampuan sekolah, dan kemampuan kelas.

Temuan hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa terdapat **kekurangsesuaian dalam hal pengertian konsep IPS dan pemahaman terhadap tujuan.** Sebagai akibat dari ketidakjelasan konsep IPS seperti tercantum dalam dokumen kurikulum, guru menterjemahkan konsep IPS sebagai ilmu pengetahuan sosial terba-

tas pada pengetahuan geografi, ekonomi, dan sejarah. Terjemahan guru ini didasarkan kepada pemahaman guru melalui pokok-pokok bahasan / subpokok bahasan dan materi pembelajaran yang tercantum dalam dokumen kurikulum yang memuat aspek-aspek pengetahuan :

Geografi / ilmu bumi yakni pokok bahasan 1.1 subpokok bahasan 1.1.1 butir 1, 2, 3, 4,7 ; subpokok bahasan 1.1.2 butir 2, 3, 4, 5 ; pokok bahasan 3.1 butir 1, 2 ;

Sejarah yakni pokok bahasan 2.1 subpokok bahasan 2.1.1 ; 2.1.2 ; 2.1.3 ; 2.1.4 ; pokok bahasan 4.1 ; 5.1 ; pokok bahasan 7.1 ; 8.1 ;

Ekonomi yakni pokok bahasan 1.1 subpokok bahasan 1.1.1 butir 6 ; pokok bahasan 6.1 subpokok bahasan 6.1.1 ; 6.1.2 ; 6.1.3 (perhatikan TABEL 2.6 dan 2.7).

Demikian pula dengan tujuan IPS, ditemui adanya perbedaan persepsi antara guru dengan pengembang kurikulum. Tujuan diberikannya IPS menurut pengembang kurikulum mencakup tujuan pengetahuan, tujuan keterampilan, dan tujuan nilai, dalam rangka mencapai tujuan kewarganegaraan. Menurut pandangan guru, tujuan diberikannya IPS ditekankan pada tujuan pengetahuan, sehingga dalam mengembangkan rencana pengajaran, kegiatan belajar mengajar, maupun mengukur hasil belajar siswa, perhatian guru hanya diberikan kepada aspek pengetahuan IPS. Pemahaman guru ini erat kaitannya dengan konstruksi tujuan yang tercantum dalam dokumen kurikulum, di mana aspek pengetahuan lebih ditekankan baik di dalam bagian tujuan pembelajaran maupun dalam bagian materi pembelajaran.

Implikasi dari perbedaan persepsi tentang konsepsi IPS di antara pengembang kurikulum dengan guru mengenai tujuan IPS adalah tidak tercapainya tujuan akhir (ends) pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar. Pencapaian yang diperoleh siswa melalui implementasi kurikulum IPS hanya pencapaian tujuan pengetahuan. Meskipun proses pembelajaran, dalam arti prosedur pelaksanaan implementasi kurikulum IPS dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum dan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen kurikulum, tetapi isi atau secara konseptual kurang memenuhi tuntutan tujuan diberikannya IPS pada tingkat sekolah dasar. Kelemahan yang paling menonjol adalah tidak tercapainya tujuan nilai yang merupakan bagian penting dari diberikannya IPS. Hal ini merupakan jawaban mengapa selama ini pengajaran IPS dirasakan hanya sebagai beban baik bagi siswa maupun bagi guru. Pengajaran IPS yang bertumpu kepada tujuan pengetahuan, dengan penjabaran pada pengetahuan faktual menyebabkan materi IPS hanya berisikan bahan-bahan pengetahuan faktual yang tidak menuntun siswa untuk mengembangkan ke-terampilan problem-solving, atau menanamkan sikap hidup bermasyarakat yang sesuai dengan norma yang dianut oleh masyarakatnya.

Dalam posisi yang demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi kurikulum IPS dalam tahap perencanaan meskipun terdapat kesesuaian kerangka atau prosedur pelaksanaan, tetapi masih belum dapat diharapkan untuk tercapainya tujuan akhir (ends) pendidikan, sebab terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengertian

konsep dan tujuan IPS antara pengembang kurikulum sebagai pencetus ide / konsep kurikulum IPS dengan guru sebagai pelaksana di lapangan.

3. Kesesuaian antara implementasi kurikulum IPS dalam tahap kegiatan belajar mengajar dengan dokumen dan pandangan pengembang kurikulum.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dalam tahap kegiatan belajar mengajar ditemui adanya kesesuaian antara apa yang dilaksanakan oleh guru dengan tuntutan kurikulum. Kesesuaian tersebut meliputi hal-hal :

- a) Strategi pembelajaran yang berorientasi pada tingkat perkembangan siswa dan berorientasi pada lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh para pengembang kurikulum dan juga tertuang dalam dokumen kurikulum. Penjabaran kedua aspek tersebut ditunjang oleh tuntutan kepala sekolah yang lebih memperhatikan aspek kemampuan belajar siswa.
- b) Penggunaan metode dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan topik pembahasan materi, kemampuan guru, dan ketersediaan sarana penunjang. Penyesuaian aspek-aspek tersebut tercantum dalam dokumen kurikulum, di mana metode pembelajaran tidak ditentukan secara ketat, melainkan diberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan sendiri metode pembelajaran yang dianggap dapat membantu proses pembelajaran, sehingga tampak peran guru sebagai pengembang kurikulum di kelas.

- c) Penggunaan sarana, media, dan sumber-sumber belajar disesuaikan dengan topik pembahasan materi dan kondisi sekolah yang menunjang ketersediaan sarana-sarana tersebut.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa guru melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan profesinya sebagai pengembang kurikulum di kelas. Apa yang dilakukan oleh guru dapat dikategorikan sebagai *teachers as curriculum modifier*, sebab guru mengembangkan kegiatan belajar mengajar mengacu kepada kepentingan dan kondisi siswa, seperti yang diungkapkan dalam teori bahwa implementasi kurikulum hampir seluruhnya bergantung pada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru, dan dalam hal ini terdapat tiga kelompok klasifikasi guru sebagai pengembang kurikulum di kelas yakni klasifikasi guru sebagai penerima dan pelaksana kurikulum, guru sebagai pelaksana kurikulum yang dimodifikasi, dan guru sebagai pengembang kurikulum (Marsh & Stafford, 1988 : 102). Klasifikasi guru sebagai orang yang memodifikasi kurikulum adalah guru yang secara sederhana berupaya memodifikasi kurikulum dalam rangka menyelaraskan dengan kondisi kelasnya.

Temuan hasil penelitian juga memberi gambaran bahwa terdapat **kekurangsesuaian dalam hal kegiatan belajar mengajar yang terlalu menekankan aspek tujuan pengetahuan**. Kondisi ini erat kaitannya dengan pemahaman guru terhadap konsep IPS dan tujuan diberikannya IPS yang sangat ditekankan pada tujuan pengetahuan. Dengan demikian, guru cenderung mengembangkan proses pembel-

jaran yang tertuju kepada aspek pengetahuan. Meskipun dalam dokumen kurikulum bagian pendahuluan dijelaskan mengenai fungsi dan tujuan IPS yang menyangkut aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai, tetapi pada bagian tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang tampak hanya aspek pengetahuan dan aspek keterampilan saja. Dalam hal ini sebenarnya peran sosialisasi atau pemasyarakatan kurikulum sangat besar dalam rangka pemantapan pemahaman guru terhadap kurikulum 1994. Masalahnya adalah bahwa sosialisasi kurikulum 1994 dilaksanakan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum. Sosialisasi tingkat pusat yang melibatkan pengembang kurikulum sebagai nara sumber mencakup masing-masing bidang studi yang memiliki karakteristik masing-masing bidang studi, tetapi sosialisasi tingkat daerah yang tidak melibatkan pengembang kurikulum sebagai nara sumber, dilaksanakan dalam waktu sangat terbatas dan materi diberikan secara umum tanpa mensosialisasikan masing-masing bidang studi. Dengan demikian, guru sebagai pelaksana implementasi kurikulum 1994 di lapangan kurang memiliki bekal yang cukup terhadap karakteristik kurikulum 1994 khususnya kurikulum IPS, sehingga yang muncul dalam proses pembelajaran yang muncul adalah penekanan pada aspek pengetahuan dan ditambah dengan sedikit aspek keterampilan, sebagai hasil dari pemahaman guru terhadap dokumen kurikulum yang memberi gambaran demikian.

Pada kondisi yang demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah implementasi kurikulum IPS dalam tahap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar meskipun terda-

pat kesesuaian dalam prosedur pelaksanaan, tetapi masih belum mencapai hasil yang maksimal dalam rangka tercapainya tujuan diberikannya IPS. Melihat posisi guru sebagai pengembang kurikulum kelompok klasifikasi kedua, sebenarnya dapat dicapai kegiatan belajar mengajar yang lebih baik apabila dibarengi dengan pematapan pemahaman guru terhadap kurikulum IPS 1994, sebab selain guru tidak dituntut untuk mengejar target akhir (ulangan umum / sumatif), guru juga memiliki motivasi dan kesadaran mengajar yang tinggi sebagai akibat dari kondisi kondusif yang diciptakan oleh lingkungannya (kepala sekolah).

4. Kesesuaian antara implementasi kurikulum IPS dalam tahap evaluasi pengajaran dengan dokumen dan pandangan pengembang kurikulum.

Temuan hasil penelitian memperlihatkan adanya kesesuaian antara apa yang dilaksanakan oleh guru dengan dokumen kurikulum dan persepsi pengembang kurikulum dalam hal :

- a) Penilaian untuk memperoleh umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Hal ini dilakukan oleh guru dalam bentuk memberi pertanyaan-pertanyaan pengulangan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar dilaksanakan (pre-test dan post-test), evaluasi terhadap hasil-hasil ulangan siswa, konsultasi antar sesama guru paralel mengenai hasil yang diperoleh siswa. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut guru dapat memperoleh gambaran mengenai

hasil pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya.

- b) Penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan dilaksanakan sesuai dengan topik-topik pembahasan materi dan dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal ini guru mengembangkan perangkat ulangan dan perangkat ulangan bersama.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa guru melaksanakan evaluasi pengajaran sesuai dengan tuntutan implementasi kurikulum dan tuntutan sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang dilakukan oleh guru memperlihatkan bahwa guru mengerti tugas profesionalnya sebagai seorang guru yang tidak hanya menyampaikan bahan pengajaran kepada siswa tetapi juga mencari umpan balik terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan mengukur pencapaian hasil belajar siswa.

Temuan hasil penelitian memperlihatkan **kekurangsesuaian dalam hal penilaian hasil belajar hanya dilakukan melalui ulangan saja (paper and pencil), tidak dimasukkannya unsur performance siswa sebagai salah satu aspek dalam menilai hasil belajar siswa.** Hal ini dilandasi oleh pemahaman guru terhadap IPS yang hanya ditujukan kepada aspek pengetahuan, sehingga guru mengukur hasil belajar siswa hanya tertuju kepada aspek pengetahuan, sedangkan menurut pengembang kurikulum, penilaian tidak hanya melalui pengukuran terhadap hasil belajar (test) saja, melainkan dapat juga melalui unjuk kerja (performance). Masalahnya adalah apa yang diungkapkan oleh pengembang kurikulum tidak ter-

tuang dalam dokumen kurikulum dan prosedur sosialisasi kurikulum 1994 kurang memberi masukan kepada guru mengenai tahap evaluasi hasil belajar yang diinginkan oleh kurikulum IPS.

Apabila diperhatikan bahwa guru memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sebagai seorang guru, maka sangat disayangkan bahwa pencapaian tahap evaluasi pengajaran ini kurang memenuhi harapan karena kurangnya informasi yang diterima oleh guru pada waktu sosialisasi kurikulum, dan kurangnya informasi yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Dengan demikian, maka evaluasi hasil belajar siswa yang terukur hanya dalam aspek pengetahuan saja, sedangkan aspek keterampilan dan aspek nilai tidak terukur. Keterukuran aspek pengetahuan tidak dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan IPS, sebab aspek pengetahuan hanya merupakan sebagian dari tujuan akhir pendidikan IPS.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum IPS

Dalam proses implementasi suatu kurikulum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kesiapan pihak sekolah sebagai pelaksana berupa ketersediaan sarana, gaji guru, peran kepala sekolah, kondisi siswa, dan kesiapan Depdikbud sebagai pengelola atau pembina berupa kelengkapan dokumen kurikulum, sosialisasi kurikulum. Melalui penelitian ini, faktor-faktor peran kepala sekolah dan sosialisasi kurikulum dimunculkan dengan pertimbangan bahwa kedua faktor inilah yang menjadi ujung tombak dalam proses implementasi kurikulum IPS. Faktor-faktor lain

merupakan faktor-faktor yang sulit untuk dimanipulasi dalam arti sudah merupakan input (masukan) yang demikian adanya.

Dari temuan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum IPS. Faktor-faktor tersebut meliputi :

- a) **Sosialisasi kurikulum dan kelengkapan perangkat kurikulum** sangat mempengaruhi pemahaman guru tentang kurikulum IPS. Berdasarkan wawancara dengan guru ditemui bahwa sosialisasi kurikulum 1994 dilaksanakan hanya dalam waktu tiga hari dan lingkup materi adalah mengenai kurikulum secara umum, tidak membahas khusus tentang IPS, sehingga pemahaman guru tentang kurikulum IPS kurang mendalam seperti yang diharapkan oleh pengembang kurikulum. Perangkat kurikulum yang dimiliki oleh sekolah tidak lengkap, di mana guru belum menerima buku pedoman / panduan mengajar IPS, sehingga apa yang diterjemahkan oleh guru melalui GBPP IPS adalah seperti apa yang tercantum dalam dokumen GBPP tersebut. Dengan berbekal pemahaman dan kelengkapan dokumen kurikulum yang terbatas ini, maka dapat diperoleh gambaran adanya kekurangsesuaian antara implementasi dengan tuntutan kurikulum. Di sini tampak bahwa sosialisasi kurikulum dan kelengkapan dokumen kurikulum akan sangat mempengaruhi keterlaksanaan implementasi kurikulum IPS tersebut.
- b) **Peran Kepala Sekolah** mempunyai pengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam hal :

- kemauan guru untuk mengembangkan rencana pengajaran. Setiap hari buku rencana pengajaran guru diperiksa oleh kepala sekolah, sehingga guru terbiasa untuk melaksanakan tugas mengajarnya sesuai dengan rencana harian yang telah dikembangkan tersebut;
- evaluasi hasil belajar siswa, di mana perangkat soal ulangan yang dikembangkan oleh guru dan rekapitulasi hasil ulangan siswa diperiksa oleh kepala sekolah, sehingga guru dituntut untuk secara bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya. Demikian pula perangkat test ulangan umum dikonstruksi oleh kepala sekolah, sehingga guru dituntut untuk bertanggungjawab melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik;
- kebutuhan akan sarana dan media pembelajaran disediakan oleh kepala sekolah sesuai dengan permintaan / kebutuhan guru, sehingga hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sebagai akibat minimnya sarana pembelajaran dapat diatasi.

Terhadap dua faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dapat disimpulkan bahwa (a) pelaksanaan sosialisasi kurikulum tidak dapat dilakukan hanya dalam waktu terbatas dengan materi yang terbatas pula, sebab sosialisasi kurikulum sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Apabila sosialisasi kurikulum dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum maka proses implementasi yakni kegiatan belajar mengajar dan prosedur pengukuran terhadap hasil pembelajaran tidak akan

mencapai sasaran yang diharapkan. Implikasi dari hal tersebut di atas adalah tidak tercapainya tujuan pendidikan IPS, karena apa yang dihasilkan melalui kegiatan belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar tidak sesuai dengan ide yang dikembangkan oleh pengembang kurikulum. (b) Demikian pula kepala sekolah sebagai manager yang mengelola dan mengatur kegiatan pendidikan di sekolah sangat penting perannya dalam rangka ketercapaian tujuan pendidikan di sekolah. Melihat apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah pada unit penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tidak lepas dari peran kepala sekolah yang berhasil menciptakan kondisi yang kondusif.

6. Temuan hasil penelitian memperlihatkan beberapa hal yang patut untuk mendapat perhatian

Atas dasar temuan hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang patut untuk diperhatikan, terutama dalam hal implementasi kurikulum IPS, yakni :

- Guru kurang terampil dalam mengkonstruksi tujuan pembelajaran (TIK), di mana tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh guru tidak memenuhi syarat sebagai tujuan pembelajaran / TIK.
- Pola pembelajaran menyeluruh memperlihatkan suasana pembelajaran yang kurang memotivasi siswa untuk mau belajar IPS, dan evaluasi hasil belajar mem-

perlihatkan hasil yang lebih rendah bila dibandingkan dengan pola pembelajaran bertahap.

- Guru kurang mampu mengembangkan butir-butir soal ulangan yang mengukur pengetahuan kognitif tinggi. Hal ini tampak dari keseluruhan perangkat ulangan yang dikembangkan oleh guru cenderung mengukur pengetahuan kognitif rendah.

Berdasarkan apa yang diungkapkan di atas, secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa kerangka kerja guru secara prosedural dalam implementasi kurikulum IPS sesuai dengan tuntutan kurikulum, yakni guru mengembangkan rencana pengajaran berupa program catur wulan dan rencana harian, guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan materi kurikulum yang dikembangkan dari dokumen kurikulum dan menetapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan (topik dan kondisi kelas), serta guru melaksanakan evaluasi pengajaran berupa evaluasi untuk memperoleh umpan balik dan evaluasi hasil belajar disesuaikan dengan topik pembahasan / materi pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa teori kesesuaian substansi kurikulum dapat digunakan untuk melihat kesinambungan antara konsep / ide pengembang kurikulum dengan rencana kurikulum dan implementasi kurikulum dalam bentuk kegiatan proses pembelajaran IPS. Permasalahannya adalah kesesuaian kerangka kerja tersebut masih kurang bila ditinjau dari aspek isi / materi (konseptual) mengenai IPS. Temuan-temuan penelitian memperlihatkan kekurangsesuaian tersebut dalam hal pengertian konsep IPS, tujuan IPS, pengembangan materi IPS, dan pengukuran hasil belajar IPS, yang semua

ini mengacu kepada kekurangsesuaian dalam hal isi / materi (content curriculum). Hal ini memberi implikasi terhadap tidak tercapainya tujuan akhir dari pendidikan IPS di tingkat sekolah dasar, karena ketercapaian tujuan pengetahuan tidak dapat dijadikan tolok ukur bagi ketercapaian tujuan pendidikan IPS yang sebenarnya merupakan perpaduan dari tujuan pengetahuan, tujuan keterampilan, dan tujuan nilai dalam rangka mencapai tujuan kewarganegaraan. Kelemahan ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh guru melalui sosialisasi kurikulum dan keterbatasan informasi yang terdapat dalam dokumen kurikulum. Demikian pula alur penyebaran sosialisasi kurikulum menempuh perjalanan panjang melalui beberapa tahap birokrasi dan administratif, yakni sejak dari Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan (Pusbangkurandik), melalui jalur Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, dilanjutkan ke Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari masing-masing propinsi, untuk kemudian disebarkan ke sekolah-sekolah melalui Kantor Departemen (Kandep) masing-masing wilayah, sehingga informasi yang sampai kepada guru sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum. Alur birokrasi dan administratif yang panjang ini memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan ide kurikulum, sebab sesuai dengan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum (sebagai titik awal ide / konsep kurikulum dikembangkan) tidak sepenuhnya sampai kepada guru (sebagai pelaksana di lapangan).

5.2 Tinjauan Terhadap Hasil Kesimpulan

Sejalan dengan hasil kesimpulan yang diperoleh, pada bagian ini akan diuraikan posisi pengembangan kurikulum di Indonesia, agar rekomendasi yang akan disampaikan tidak lepas dari konteks keberadaan kurikulum tersebut di Indonesia.

Model pengembangan kurikulum yang diterapkan di Indonesia adalah model Administrative (Line-staff) di mana proses pengembangan kurikulum berasal dari tingkat nasional dan kurikulum sebagai rencana (dokumen kurikulum) berlaku secara nasional, dalam arti apa yang dikembangkan dalam dokumen kurikulum harus dilaksanakan di setiap wilayah di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya selain kurikulum inti yang bersifat nasional juga termuat kurikulum muatan lokal, tetapi persentase kurikulum muatan lokal hanya 20 % dari keseluruhan muatan kurikulum tersebut. Implikasi dari pengembangan model line-staff ini adalah sifat kurikulum "*tidak siap pakai*" (Hamid Hasan, 1988 : 109) dalam arti dokumen kurikulum yang diterima oleh guru masih harus dikembangkan menjadi rencana yang lebih operasional. Pada posisi inilah guru dituntut untuk bekerja secara profesional yakni sebagai pengembang kurikulum di kelas. Sifat tidak siap pakai ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kurikulum inti yang bersifat nasional harus dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian rencana kurikulum tidak dapat dirinci dengan ketat.

Di lain pihak, model kurikulum yang demikian menyebabkan guru terikat pada rencana kurikulum / dokumen kurikulum. Pada posisi ini dokumen kurikulum menjadi

sangat penting bagi guru sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dokumen kurikulum harus dapat diterjemahkan dengan mudah oleh guru dan tidak memberi kesempatan kepada guru untuk menginterpretasikannya secara ganda (berbeda). Pengembangan dokumen kurikulum yang demikian tidaklah mudah, mengingat dalam proses pengembangan kurikulum sampai terwujudnya dokumen kurikulum, hal tersebut dilakukan dalam satu tim. Bagaimana wujud kerjasama dalam satu tim pengembang kurikulum akan tampak dari dokumen kurikulum yang dihasilkan.

Ide pengembang kurikulum yang dituangkan dalam dokumen kurikulum akan diterima oleh guru dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar. Apabila di antara tim pengembang kurikulum memiliki pandangan yang sama mengenai ide kurikulum, maka ide tersebut dapat dituangkan secara jelas ke dalam dokumen kurikulum. Tetapi belum berarti bahwa guru dapat menterjemahkan ide tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengembang kurikulum, sebab seperti telah dikemukakan bahwa dokumen kurikulum tidak dapat dirinci dengan ketat mengingat kurikulum tersebut berlaku secara nasional dan masing-masing daerah memiliki karakteristik ke-daerahannya. Dengan demikian diperlukan suatu bentuk kegiatan pemasyarakatan kurikulum atau yang disebut dengan sosialisasi kurikulum dan dibentuk suatu wadah yang merupakan sarana guru untuk berkomunikasi dengan nama Kelompok Kerja Guru (KKG).

Dalam kaitannya dengan memasyarakatkan kurikulum, dalam hal ini kurikulum baru yang memuat ide-ide baru, perlu untuk dipertimbangkan bahwa kegiatan tidak

hanya berkaitan dengan aspek waktu / lamanya pelaksanaan sosialisasi. Pertimbangan juga diberikan kepada pemikiran bagaimana ide-ide baru tersebut, yang di dalamnya tercakup *skills* dan *attitudes* baru, dapat disampaikan dan diterima oleh guru. Kegiatan dan wadah ini bertujuan untuk menjembatani antara ide pengembang kurikulum dengan guru sebagai pelaksana di lapangan. Di samping itu kepala sekolah memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan proses pelaksanaan / implementasi kurikulum, sebab kepala sekolah sebagai atasan langsung guru berkewajiban untuk mengontrol kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Kedua aspek inilah yang menjadi faktor pengaruh dalam implementasi kurikulum di sekolah.

5.3 Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa rekomendasi. Rekomendasi ini diajukan kepada pihak guru dan kepala sekolah, pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan kepada peneliti-peneliti berikutnya.

1. Rekomendasi kepada Guru dan Kepala Sekolah

Sesuai dengan hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa kelemahan dalam proses pembelajaran adalah dalam hal isi / materi, maka direkomendasikan kepada guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dengan memperhatikan :

- Aspek pemahaman guru terhadap tujuan IPS yang tidak hanya memperhatikan tujuan pengetahuan saja, melainkan perlu juga memperhatikan tujuan keterampilan dan tujuan nilai dalam rangka mencapai tujuan kewarganegaraan.
- Pengembangan tujuan pembelajaran (TIK) dengan memperhatikan syarat-syarat mengembangkan TIK, sehingga tujuan pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dan dapat diukur pencapaiannya.
- Pengembangan materi pembelajaran, agar guru tidak terlalu terpaku pada aspek pengetahuan faktual, melainkan juga memperhatikan aspek keterampilan dan aspek nilai di dalam mengembangkan materi pembelajaran tersebut.
- Pemahaman guru terhadap evaluasi hasil belajar yang tidak hanya terpaku kepada ulangan (test, paper and pencil) tetapi juga memperhatikan aspek performance siswa di dalam mengukur hasil belajar siswa. Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan oleh guru bahwa IPS mencakup tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga aspek keterampilan dan aspek nilai.
- Meninjau kembali pola pembelajaran menyeluruh, sebab tampak dari hasil penelitian bahwa pola tersebut memiliki kelemahan apabila diterapkan pada siswa sekolah dasar.

Untuk merealisasi upaya tersebut di atas, dapat ditempuh dengan keikutsertaan kepala sekolah untuk mendorong guru agar mau mengembangkan dirinya sebagai

tenaga profesional, mengaktifkan guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), dan memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan penataran atau penyegaran yang berkaitan dengan perluasan pemahaman guru terhadap kurikulum IPS.

Penataran-penataran yang diberikan kepada guru seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan kualitas pengajaran dan pendalaman materi bidang studi. Perlu untuk diperhatikan bahwa latar belakang guru beragam baik latar belakang pendidikan maupun latar belakang pengalaman mengajar. Untuk guru yang telah mengajar lebih dari 10 tahun, kiranya pantas untuk diberikan penataran yang sifatnya penyegaran terhadap pendalaman atau pembaharuan bidang-bidang studi (materi bidang studi), sedangkan guru yang pengalaman mengajar kurang dari 10 tahun diberikan penataran untuk meningkatkan kualitas pengajarannya. Penataran ini tidak dapat hanya diberikan dalam jangka waktu terbatas (kurang dari tiga hari), sebab efektivitas penataran singkat tersebut sangat diragukan. Lebih bermanfaat apabila lama waktu penataran disesuaikan dengan banyaknya dan kedalaman bahan yang akan disampaikan.

Keikutsertaan guru dalam Kelompok Kerja Guru (KKG) akan memberi kesempatan kepada guru untuk memperluas wawasan mengenai materi bidang studi yang akan diajarkan. Hasil penelitian yang memberi gambaran bahwa sosialisasi kurikulum 1994 yang diselenggarakan dalam waktu tiga hari tidak menjadikan guru memahami benar karakteristik kurikulum 1994. Hal ini memberi gambaran bahwa penataran atau sosialisasi yang diselenggarakan dalam waktu terbatas kurang efektif bagi peningkatan

pemahaman guru terhadap perkembangan kurikulum dan pengetahuan. Dengan demikian, memanfaatkan KKG sebagai ajang pertukaran informasi dan pendalaman materi bidang studi atau perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia pendidikan akan lebih memberi manfaat bagi peningkatan kualitas profesional guru.

2. Rekomendasi kepada pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan erat kaitannya dengan ketercapaian implementasi kurikulum di sekolah. Untuk itu rekomendasi diberikan kepada :

Pihak Pengembang Kurikulum

- Agar memperhatikan bahwa ide / konsep IPS yang dikembangkan oleh pengembang kurikulum diperoleh guru setelah melalui jalur birokrasi dan administratif yang panjang sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan atau pembiasan. Dalam hal ini perlu untuk dipikirkan bagaimana menuangkan ide / konsep tersebut secara jelas dan mudah diterima oleh guru ke dalam dokumen kurikulum, atau melakukan sosialisasi kurikulum dengan melibatkan langsung pengembang kurikulum sampai di tingkat daerah, sebab dokumen kurikulum merupakan pedoman bagi guru, sehingga perlu untuk dipertimbangkan agar dokumen kurikulum tersebut tidak diinterpretasi ganda oleh guru.
- Hal lain yang perlu untuk disampaikan kepada pengembang kurikulum adalah penetapan terhadap konsepsi IPS, di mana dari hasil penelitian memperlihatkan

bahwa terhadap konsepsi (arti dan tujuan) IPS masih terdapat dua pandangan yang berbeda, sehingga terdapat ketidakjelasan konsepsi yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Apabila IPS SD yang dikembangkan di Indonesia mengacu kepada social studies yang berasal dari ilmu-ilmu sosial, maka penetapan materi pembelajaran harus dapat menuntun siswa untuk mengembangkan kemampuan problem solving terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh siswa, dan pengintegrasian disiplin ilmu-ilmu sosial memberi bentuk baru yang tidak tampak disiplin keilmuannya. Dengan demikian tidak terjadi pengembangan bahan materi yang hanya bertumpu pada aspek pengetahuan faktual.

- Hal-hal yang tampak belum jelas bagi guru dalam kurikulum IPS adalah ide tentang konsep dasar dan keterampilan dasar dalam mengembangkan materi kurikulum IPS. Di sini ide yang diharapkan oleh pengembang kurikulum tidak sampai kepada guru karena ide tersebut tidak dituangkan dalam dokumen kurikulum, sedangkan guru juga belum memperoleh pedoman penuntun kurikulum IPS. Dengan demikian, perlu untuk diperhatikan bahwa sosialisasi kurikulum sebaiknya disertai dengan penyebaran buku pedoman penuntun kurikulum, agar guru selain mendapat informasi langsung juga memperoleh pedoman berupa informasi tertulis.
- Demikian pula informasi yang sangat terbatas mengenai pelaksanaan evaluasi hasil belajar menyebabkan guru melaksanakan evaluasi hasil belajar terbatas pada test tertulis, tidak melaksanakan evaluasi performance. Hal ini juga terjadi karena guru

tidak memperoleh informasi yang rinci dan jelas pada waktu diselenggarakannya sosialisasi kurikulum.

Terhadap aspek-aspek yang ditemui dari hasil penelitian tersebut di atas, dapat diberikan alternatif antara lain (a) mendayagunakan Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai sarana sosialisasi kurikulum secara berkelanjutan dan menampung serta memberi pemecahan terhadap masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru; (b) menjadikan pengembang kurikulum sebagai nara sumber dalam pertemuan-pertemuan berkala baik pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak KKG atau pertemuan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Dalam hal ini akan terjadi komunikasi dua arah antara pengembang kurikulum sebagai curriculum developer dan guru sebagai pemakai kurikulum; (c) melakukan kaji ulang terhadap dokumen kurikulum, terutama kepada aspek-aspek yang ditemukan dalam penelitian ini yang masih memperlihatkan kelemahan-kelemahan, dalam rangka perbaikan terhadap kurikulum khususnya kurikulum IPS pada masa mendatang.

Bagi pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini pihak Kandep dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, agar memperhatikan pengembangan materi sosialisasi kurikulum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak pengembang kurikulum. Demikian pula pihak-pihak tersebut di atas dapat menggerakkan KKG dalam rangka menampung dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum IPS.

Satu alternatif yang dapat dikembangkan oleh pihak Depdikbud dalam rangka menggerakkan KKG adalah membentuk suatu wadah atau forum yang beranggotakan pihak P3G yang mewakili Depdikbud sebagai pengelola (pembina / penatar), pihak pengembang kurikulum, pihak LPTK, serta wakil dari pihak sekolah yang tergabung dalam KKG. Wadah ini merupakan tempat bertemunya ketiga unsur tersebut yakni pengembang kurikulum sebagai pihak pencetus dan pengembang ide kurikulum, wakil dari LPTK sebagai pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan dan pengembangan teoritik kependidikan, dan wakil dari sekolah / KKG sebagai pihak pelaksana di lapangan. Melalui wadah inilah dapat ditampung kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh pihak pelaksana (guru) untuk kemudian dicarikan pemecahannya melalui masukan yang diberikan oleh pihak pengembang kurikulum dan pihak LPTK. Dengan demikian, guru atau KKG tidak terjebak dalam kegiatan rutinitas di lapangan, tetapi juga memperoleh masukan dan pengembangan baik dalam segi kependidikan maupun dalam segi pengembangan bidang keilmuan. Demikian pula LPTK sebagai lembaga yang menghasilkan tenaga keguruan memiliki wawasan lapangan sehingga apa yang dikembangkan dalam kurikulum LPTK dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan (sekolah). Pihak pengembang kurikulum pun memperoleh masukan langsung dari guru mengenai apa yang sesungguhnya dibutuhkan di lapangan sehingga kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh guru di lapangan dapat dijadikan masukan oleh pihak pengembang kurikulum dalam rangka perbaikan kurikulum.

Kegiatan atau aktivitas forum / wadah ini diharapkan tidak hanya merupakan *one-shot activity*, melainkan suatu kegiatan yang sifatnya berkala dan berkesinambungan. Dengan demikian, apabila muncul perkembangan baru baik dalam bidang kependidikan maupun dalam bidang kajian keilmuan (bidang studi) dapat dengan segera diinformasikan melalui forum tersebut kepada guru-guru sebagai pelaksana di lapangan. Pada perkembangan selanjutnya dari forum / wadah ini diharapkan dapat dihasilkan suatu karya berupa buku panduan atau semacam *teacher's handbook* yang dapat dijadikan pegangan bagi para guru. Melalui forum ini juga, guru-guru yang merupakan wakil dari KKG dapat dijadikan sebagai *master teacher* khusus untuk bidang studi IPS bagi sekolahnya masing-masing.

Forum atau wadah ini sebaiknya berada pada tingkat kabupaten sehingga dari pihak pengembang kurikulum dapat dikelola dan dikembangkan oleh jaringan kurikulum yang telah ada pada tingkat propinsi, dari pihak pengelola / pembina yakni depdikbud dapat dikelola dan dikembangkan oleh P3G, dan dari pihak LPTK dapat dikelola oleh lembaga LPTK yang ada pada tingkat propinsi atau kalau memungkinkan pada tingkat kabupaten / kotamadia. Melalui forum pada tingkat kabupaten ini, dapat dijangkau sekolah-sekolah yang memang membutuhkan bimbingan, pengarahan dan penyegaran sehingga implementasi kurikulum IPS dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang kurikulum. Di pihak lain, forum dalam tingkat kabupaten dapat merupakan sarana monitoring bagi jaringan kurikulum, dan dapat pula mendekat-

kan sekolah sebagai pusat kegiatan di lapangan dengan pihak LPTK terutama yang berada di tingkat kabupaten / kotamadia.

3. Rekomendasi bagi Program Studi Pengembangan Kurikulum dan penelitian berikutnya

Dari hasil penelitian yang terungkap, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini masih berada dan memiliki beberapa keterbatasan, yaitu ditemukan adanya permasalahan-permasalahan yang tidak diungkapkan lebih jauh dalam penelitian ini, seperti seberapa jauh model pembelajaran menyeluruh yang diterapkan guru mempengaruhi daya serap atau pemahaman siswa, seberapa jauh pengaruh konstruksi TIK terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, bagaimana mengukur aspek nilai dalam proses pembelajaran IPS. Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini belumlah memenuhi harapan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dan peduli terhadap pendidikan untuk menelaah kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bagi program Pengembangan Kurikulum, penulis harapkan munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan bidang studi IPS, terutama permasalahan kurikulum IPS pada tingkat sekolah dasar seperti seberapa jauh model pembelajaran menyeluruh yang diterapkan guru dalam bidang studi IPS mempengaruhi daya serap atau pemahaman siswa, seberapa jauh pengaruh konstruksi TIK terhadap pencapaian tujuan pembelajaran IPS, bagaimana mengukur aspek nilai dalam proses

pembelajaran IPS. Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil temuan penelitian ini, hal-hal tersebut tidak terungkap secara tuntas dan masih perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka perbaikan kualitas implementasi kurikulum bidang studi IPS.

Bagaimana faktor siswa mempengaruhi ketercapaian tujuan pembelajaran IPS merupakan bahan kajian yang dapat diungkapkan melalui penelitian lanjutan, sebab dalam penelitian ini hal tersebut tidak diungkapkan mengingat keterbatasan fokus penelitian. Permasalahan ini patut untuk diangkat dalam suatu topik penelitian mengingat bahwa peningkatan sumber daya manusia menjadi tujuan dalam pembangunan jangka panjang tahap kedua di Indonesia.